EDISI 127 TAHUN 2022

TC MEDIA

INSPIRASI UNTUK BERSINERGI

HOW'S YOUR 2022?

How's Your 2022?

Sekretariat Pengadilan Pajak

Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

Laman

setpp.kemenkeu.go.id

Surel

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Instagram

setpp.kemenkeu

tcmedia_pp

DAFTAR ISI

TC MEDIA Edisi 127 TAHUN 2022

Editorial 4
Rintik-rintik di Penghujung Tahun

Infografis 5
Dukung Kami untuk Mewujudkan ZI-WBK

Foto Kita 6

Lintas peristiwa 8

Fokus
Pengadilan Pajak di 2022 10
Harapan dan Aksi 2023 13

Lokus
Hori 76 15
Menuju KTT G20 17
Output Transformers 21

Opini
Res Judicata Pro Veritate Habetur 24

Profil
Integritas: Hoegeng Imam Santoso 23
Data Kepegawaian Set. PP 2022 26
Employee of the Month 28

IT
Cryptocurrency 32

What's Happening?
How's Your 2022? 34

Komik
SiTaco #08: Simpan Saja 35

Tim Penyusunan TC Media Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor KEP-05/SP/2022 tanggal 17 Januari 2022

Pengarah I: Sekretaris Pengadilan Pajak
Pengarah II: Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
Penanggung Jawab: Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi
Redaktur Umum: Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi
Redaktur Pelaksana: Gilang Pratama
Penyunting: M. Hafizullah Lubis
Desain Grafis dan Fotografer: Faishal Chairu Noor, Ridwan Firmansyah
Tim Redaksi: Astris Dyah Perwita, Felixita Novelia, Gabriella Grace, Penny Febriana, Rizki Damayanti, Mutia Rizki, Rahma Noor Fadhila

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

DUKUNG KAMI DALAM MEWUJUDKAN ZI-WBK

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Dukung kami dalam mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan tidak memberikan hadiah/bingkisan/parsel dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran Pengadilan Pajak dalam rangka perayaan Hari Raya Keagamaan maupun momen lainnya.

BERANI JUJUR HEBAT!

NO KORUPSI

ZONA INTEGRITAS
ZI WBK SETPP
BERSIH DARI KORUPSI

rintik-rintik di penghujung tahun

Menuju penghujung tahun 2022, beberapa wilayah mulai dibasahi oleh tetesan air hujan yang menambah kedamaian namun juga memberikan kekhawatiran tatkala hujan turun di masa-masa penduduk menyelesaikan pekerjaannya dan ingin kembali ke tempat tinggalnya. Banyak orang memilih kendaraan beratap semisal mobil dan bus guna menghindari kekhawatiran ini. Mobil-mobil ini tidak hanya menambah suasana keramaian lalu lintas, tetapi juga sebagai simbol bahwa aktivitas perekonomian tahap demi tahap sudah kembali menggelora. Geliat ini menyiratkan berbagai kisah selama tahun 2022 dengan berbagai spektrumnya. Sambil menyongsong tahun 2023, kisah di tahun 2022 tidak hanya menjadi kenangan, tetapi menjadi sumber pelajaran yang memuat banyak hikmah dan pelajaran.

Tak mudah memang merencanakan segala sesuatunya dalam keadaan yang berubah secara drastis. Namun, dengan perbekalan yang ada sedikit banyak suatu perencanaan dapat terlaksanan dengan baik. Berkaitan dengan penghujung tahun 2022, TC Media pada edisi 127 ini mengulas seluk-beluk beberapa fenomona yang terjadi selama tahun 2022, antara lain perkembangan Pengadilan Pajak selama tahun 2022, kegiatan Presidensi G20 Indonesia, dan harapan dan aksi yang akan disusun untuk tahun 2023. Dengan menyambut 2023, terdapat keyakinan besar bahwa tahun depan akan memberikan lebih banyak kebaikan.

Foto Kita

Juara I
Pelayanan
Laras Endang

Juara II
Sinergi
Budi Mulia K

Juara III
Sinergi
Arifin Nur Hidayat

Foto
Lomba Foto dalam rangkaian acara Capacity Building Set. PP 2022

KANAL INFORMASI
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
CALL CENTER KEMENKEU
134
081211007510

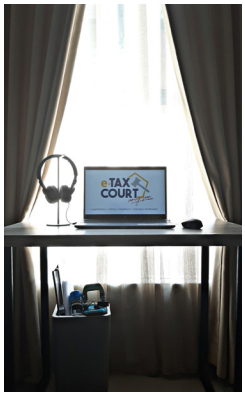
e-TAX COURT
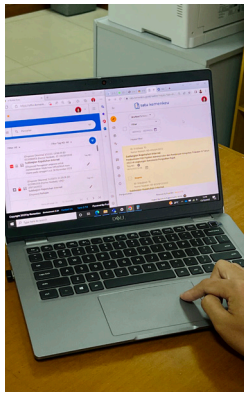
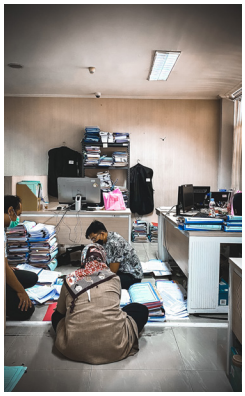
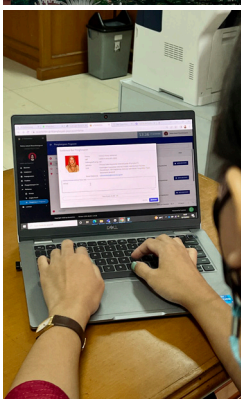

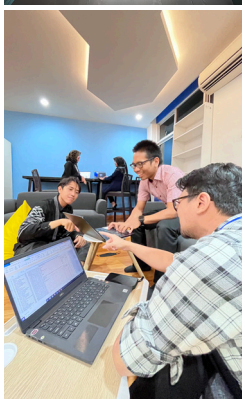

HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA
HAKIM ANG

SIGN HERE

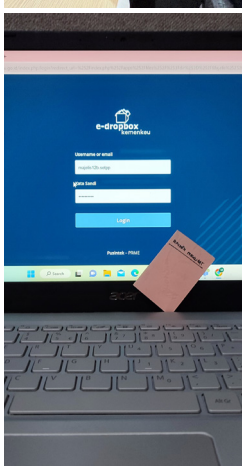
e-dropbox
Kemenkeu
Login

Lenovo

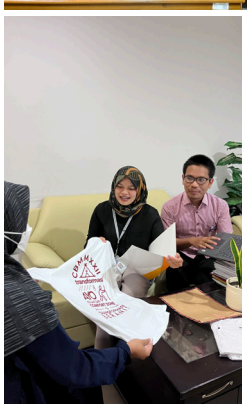

Ms Teams Pegawai dan Hakim

Jakarta, 3 Oktober. Microsoft Teams sebagai *collaboration tools* baru di lingkungan Kemenkeu, diharapkan dapat segera dioptimalkan pemanfaatannya. Untuk itu, dengan unit *in charge* di Bagian TIK, dilaksanakan 'Sosialisasi dan Pelatihan *Collaboration Tools Office* 365' untuk para pegawai tepatnya pada tanggal 28 September 2022 melalui aplikasi *Zoom Meeting*, dan ditutup pada tanggal 10 Oktober 2022 melalui aplikasi Ms Teams. Sedangkan sosialisasi untuk Hakim Pengadilan Pajak diadakan pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan agenda pengenalan *collaboration tools*, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh Kasubbag OPTIK, Rido. Selanjutnya juga telah dilaksanakan pelatihan secara *offline* bagi para Hakim.

Teks Mutia **Foto** Faishal

Rekrutmen Hakim

Jakarta, 18 Oktober 2022. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, diterbitkan PENG-01/PHPP/2022 tertanggal 29 Agustus 2022. Pada seleksi administrasi, didapatkan 222 peserta yang lolos dan melaju ke tahap selanjutnya yaitu tes pengetahuan perpajakan dan penulisan *paper*. Tes dilaksanakan pada tanggal 18-19 Oktober 2022 di Aula Gedung Dhanapala Kemenkeu. Di tanggal 4 November 2022 telah diumumkan peserta yang lolos tes pengetahuan sebanyak 53 orang, yang juga kemudian dimintakan pendapat kepada masyarakat melalui PENG-04/PHPP/2022. Selanjutnya, peserta yang lolos akan diumumkan melalui laman resmi di **rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id**.

Teks Mutia **Foto** Faishal

Pengadilan Pajak Goes to Campus: PKN STAN

Jakarta, 28 Oktober 2022. Kegiatan Pengadilan Pajak Goes to Campus (PPGTC) PKN STAN yang bertemakan '*Getting Closer and Knowing Better of Pengadilan Pajak*' dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 di Gedung G PKN STAN. Sesuai arahan SesPP, PPGTC diharapkan dapat memberikan *awareness* kepada mahasiswa mengenai proses bisnis Pengadilan Pajak pada mahasiswa PKN STAN, terlebih bagi mereka yang nantinya berkesempatan mendapatkan penempatan di SetPP. Rangkaian kegiatan yang juga melibatkan panitia dari PKN STAN ini terdiri dari pemaparan narasumber dari unsur hakim yaitu LY Hari Sih, pemaparan narasumber dari unsur kepaniteraan, Budi Setyawan M.N.Y., simulasi sidang yang mendapatkan *feedback* luar biasa dari para peserta, dan kuis berhadiah.

Teks Mutia **Foto** Faishal

Kunjungan PP ke Makassar

Makassar, 2 November 2022. Subtim *Benchmarking* Modernisasi Pengadilan Pajak telah melaksanakan studi banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar pada tanggal 2-4 November 2022. Adapun peserta studi banding melibatkan unsur pimpinan Pengadilan Pajak dan Set. PP, anggota subtim *benchmarking*, serta tim pengembang e-Tax Court. Hasil dari studi banding yaitu didapatkannya referensi regulasi dan manajemen perubahan yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses modernisasi sistem peradilan di Pengadilan Pajak.

Teks Mutia **Foto** Dok. Set.PP

Rapat Kerja Pengadilan Pajak 2022

Jakarta, 9 Desember 2022. Berlokasi di Aula Gedung BPKP Perwakilan Banten, Pengadilan Pajak mengadakan Rapat Kerja Pengadilan Pajak dengan tema 'Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Rencana Strategis Pengadilan Pajak 2023-2036'. Kegiatan ini juga makin menarik dengan adanya Seminar Penyelenggaraan Sidang yang Efektif dan Efisien, dengan narasumber Hakim Agung Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan isu-isu yang terjadi saat ini dan rencana strategis Pengadilan Pajak. Rapat kerja ditutup dengan pembacaan *Executive Summary* dan dilanjutkan seremonial penutupan Rapat Kerja oleh Ketua Pengadilan Pajak.

Teks Mutia **Foto** Faishal

Capacity Building SetPP 2022

Jakarta, 15-16 Desember 2022. Kegiatan *Capacity Building* SetPP dimulai dari tanggal 15 Desember 2022 dengan Webinar yang dibuka dengan ***keynote speech*** oleh Setjen Kemenkeu, Heru Pambudi. Acara dilakukan via Ms Teams dengan tema ***'Akselerasi Transformasi dalam rangka Peningkatan Kinerja Organisasi'*** dengan narasumber Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak dan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok, serta moderator Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur, Setjen. Kegiatan dilanjutkan dengan semangat *'Transformasi? Berani!'* pada 16 Desember 2022 yang dimeriahkan oleh Tara de Thouars. Pada kegiatan ini juga diadakan pencanangan/moment ZI WBK dan peresmian fasilitas kantor yaitu taman, parkiran sepeda, dan ruang kolaborasi.

Teks Mutia **Foto** Faishal

Pengadilan Pajak di 2022

Akhir tahun biasanya menjadi sarana untuk merefleksi diri, mengingat kembali apa yang sudah dilakukan selama tahun berjalan untuk dijadikan motivasi atau perbaikan pada tahun berikutnya. Tahun 2023 sudah berada di depan mata dalam hitungan hari. Dalam dua belas bulan belakangan begitu banyak hal yang terjadi di lingkungan Pengadilan Pajak. Perubahan demi perubahan dilakukan demi terus meningkatkan kinerja, kualitas layanan, dan juga sarana mendukung kenyamanan pegawai. Lantas apa saja pembaharuan yang terjadi selama tahun 2022 di Set.PP, mari kita simak bersama.

Taman Integritas
Slamet Riyadi

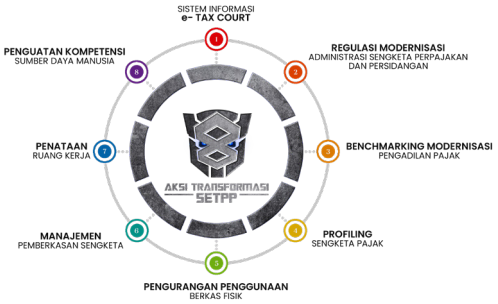

Tim Transformers

Pada awal tahun 2022, Sekretaris Set.PP membentuk Tim Transformasi Proses Bisnis, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak atau yang lebih dikenal dengan nama Tim transformer. Tim yang berisi delapan subtim dengan delapan aksi transformasi ini berkolaborasi untuk menghasilkan output berupa penyederhanaan dan digitalisasi sistem administrasi perpajakan, dan juga penguatan kompetensi SDM Pengadilan Pajak. Harapannya sistem yang dibangun yaitu *e-tax court* dapat mulai diimplementasikan pada pertengahan tahun 2023.

Ruang Kerja ASP dan Majelis XIX

Dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Set.PP melakukan renovasi terhadap beberapa ruangan yang selesai dilakukan pada Bulan April 2022 lalu. Pada tahap I ini dilakukan renovasi untuk ruang kerja ASP dan juga Majelis XIX. Renovasi ini juga sejalan dengan usulan dan termasuk salah satu aksi transformasi dari Subtim Penataan Ruang Kerja Tim Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak serta sebagai perwujudan atas kebutuhan Ruang Kerja Masa Depan yang berbasis Activity Based Workingplace (ABW) di Sekretariat Pengadilan Pajak.

Ruang Kolaborasi

Ruang kolaborasi yang berlokasi di lantai lima Gedung A Pengadilan Pajak ini merupakan ide dari Sekretaris Pengadilan Pajak untuk menciptakan suatu tempat yang dapat digunakan pegawai untuk berkolaborasi. Ruangan yang baru saja selesai direnovasi pada akhir Bulan Juli lalu ini terbagi menjadi tiga fungsi yaitu ruang kerja bersama, ruang webinar/ *podcast* serta ruangan seni dan olahraga. Ruangan yang merupakan perwujudan dari *Flexible Working Space* ini dapat diakses oleh semua pegawai untuk melakukan berbagai kegiatan positif.

Taman Transformasi

Taman yang berada di pojok dekat Masjid Al Amin Pengadilan Pajak ini diresmikan pada Bulan Desember, bertepatan dengan kegiatan *Capacity Building* Set. PP pada Desember 2022. Taman ini akan dijadikan sebagai sarana *relaxing* bagi para pegawai. Pegawai nantinya akan disilakan untuk mendonasikan tanaman jenis apapun dan akan dirawat Bersama-sama. Selain itu difasilitasi sarana jual beli tanaman, pegawai diperbolehkan untuk meletakkan tanaman yang akan diperjualbelikan secara berintegritas.

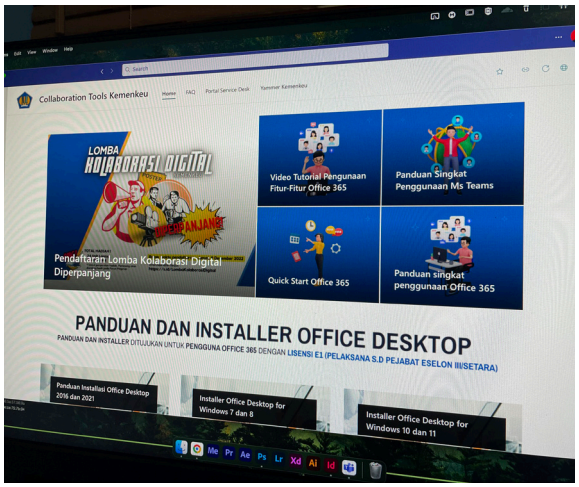

Ms Teams

Sebagai salah satu langkah transformasi digital, pada tahun 2018 Kemenkeu membentuk *office automation*. Seiring berjalannya waktu maka dilakukan berbagai upaya peningkatan, inovasi dan evaluasi dari sistem yang sudah berjalan dan ditemukan masih ada unsur kekurangan yaitu di bidang kolaborasi. Sehingga pada tahun 2022, Kemenkeu membentuk wadah *collaboration tools* melalui Ms. Teams. Tujuannya sendiri adalah untuk memusatkan dan menyederhanakan proses pekerjaan, alat bantu pekerjaan dan menyederhanakan komunikasi. *Collaboration tools* ini memungkinkan semua orang berkerja bersama-sama dan dapat dipantau langsung oleh atasan atau orang yang berkepentingan. Sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal, Set.PP turut mensukseskan penerapan Ms. Teams ini dalam berbagai kesempatan. Contohnya dalam setiap rapat di Set.PP saat ini sudah tidak menggunakan aplikasi *zoom meeting* lagi dan sudah beralih seutuhnya ke Ms. Teams. Harapannya pegawai Set.PP dapat memaksimalkan semua fungsi *tools* pada Ms. Teams sehingga dapat terbangun kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik.

Semangat perubahan dan inovasi di Set.PP terus berkembang. Berbagai permbaharuan dilakukan demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tahun 2023 akan menjadi tantangan baru bagi Set.PP untuk mengaplikasikan sistem yang dibangun serta meningkatkan layanan kepada pengguna layanan. Semoga di tahun depan Set.PP dapat menjadi lembaga yang lebih baik, menciptakan berbagai inovasi demi pengabdian kepada masyarakat.

Teks: Riz

Harapan dan Aksi 2023

What to Expect?

Di setiap penghujung tahun pasti identik dengan evaluasi dan resolusi. Tidak terkecuali Set. PP. Dari banyak kegiatan yang direncanakan, Set. PP terus melakukan perbaikan maupun inovasi yang mengarahkan setiap elemen baik pegawai, pejabat, maupun para hakim untuk pengembangan ke depan. Mari kita kulik kegiatan apa saja yang sudah direncanakan sebagai fokus utama transformasi Set. PP tahun 2023

Kolaborasi
Kirana Mareta

Implementasi Sistem Informasi *E-Tax Court*

E-Tax Court sungguh bukan hal asing. Sistem yang dikerjakan selama 2021 ini direncanakan akan diluncurkan pada bulan April 2023. Sistem ini nantinya akan meringkas proses-proses persidangan mulai dari pengajuan permohonan hingga pengiriman putusan.

Pada *E-Tax Court* nantinya akan ada beberapa modul antara lain *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Litigation*, *e-Putusan*, dan *dashboard*. Mari kita kulik satu per satu.

1. *e-Registration*

Pada modul ini, pihak pemohon banding/gugatan dapat mendaftarkan diri di sistem sehingga dapat mengajukan permohonannya masing-masing. Begitu pula dengan terbanding yang nantinya akan diberikan akun sehingga mereka dapat menyerahkan berkas-berkas sesuai dengan keperluannya masing-masing.

2. *e-Filling*

Pada modul ini, para pemohon dapat mengajukan permohonan secara elektronik. Modul ini akan menggantikan persuratan yang biasanya dikirimkan melalui pos dan seluruh prosesnya akan dilakukan secara elektronik. Seperti yang diharapkan Sobat PP semua, dokumen juga akan diunggah ke sistem secara elektronik. Selain diharapkan akan memangkas waktu penanganan, diharapkan juga dapat membantu Sobat PP dalam memanajemen berkas.

3. *e-Litigation*

Tidak berhenti di dokumen permohonan saja, *E-Tax Court* juga dibangun untuk mendukung proses persidangan. Dokumen yang selama ini dipertukarkan dengan berbagai media seperti *e-Dropbox*, *email*, dan lainnya akan difasilitasi di *E-Tax Court*. Selain itu ada panggilan sidang secara elektronik dan juga *live* sidang.

4. *e-Putusan*

e-Putusan mengadopsi proses yang sama dengan e-filing. Pengiriman putusan akan disampaikan melalui sistem dan diterima para pihak di lamannya masing-masing.

Pengembangan Otomasi Layanan Pendukung

Selain sistem utama yang menjadi fokus proses bisnis persidangan, tentu dibutuhkan sistem-sistem lain yang mendukung. Hal ini juga akan menjadi fokus transformasi di tahun 2023. Mulai dari perizinan Kuasa Hukum, Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP), antrian online, dan proses pendukung lainnya diharapkan dapat diotomasi pula. Oleh karena itu sejalan dengan implementasi E Tax Court, layanan-layanan ini juga akan menyusul untuk dikembangkan.

Penguatan Sarana Kerja dan Pelayanan

Untuk mendukung kinerja yang optimal, terus dilakukan transformasi termasuk untuk ruang kerja. Salah satu agenda tahun 2023 adalah penguatan sarana kerja dan pelayanan. Proyek perbaikan ruang kerja dengan ruangan *activity work based* dan ruang kolaborasi akan terus dikembangkan hingga nantinya bisa dimanfaatkan seluruh pegawai.

Sedangkan untuk para *stake holder*, akan ditingkatkan pula ruang pelayanan terpadu dan ruang pengaduan yang lebih baik dan nyaman.

SDM yang Adaptif dan Kolaboratif

Tidak hanya probis, teknologi, dan sarana prasarana saja yang ditransformasi. Komponen yang paling penting adalah pengembangan sumber daya manusia. Seiring dengan diimplementasikannya teknologi dan sistem baru, tentu akan ada pengembangan yang mendukung modernisasi layanan. Selain itu akan ada pembinaan intensif terkait penyelesaian sengketa. Sinergi dengan hakim juga akan lebih intensif dengan adanya pengukuran kinerja hakim yang sejak tahun ini memiliki IKU masing-masing.

Untuk tetap melakukan transformasi secara terarah dan terukur, akan ada roadmap pengembangan berkelanjutan untuk Hakim dan Kepaniteraan.

Transformasi memang bukan hal yang mudah. Namun perubahan itu mutlak untuk dilakukan untuk bergerak maju. Dan untuk melangkah maju dengan efek yang signifikan, dibutuhkan kerja sama di segala bidang, komponen, dan dukungan semua pihak.

Teks: ADP

HORI 76

Kemenkeu Satu: Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan

Tanggal 30 September 2022 merupakan pembukaan rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-76 dengan tema ***"Kemenkeu Satu: Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan"***. Dalam acara pembukaan tersebut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan agar seluruh insan Kementerian Keuangan untuk dapat menanamkan tema HORI tahun 2022 ini yaitu untuk sigap dalam menghadapi tantangan serta tangguh mengawal pemulihan yang merupakan tugas kita bersama. Selain itu beliau juga mengucapkan "Selamat Hari Oeang. Mari kita merayakan dan tetap memberikan yang terbaik bagi Indonesia sebagai bukti bahwa kita tidak pernah lelah mencintai Indonesia".

Setiap tanggal 30 Oktober seluruh insan Kementerian Keuangan memperingati Hari Oeang Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan HORI, dimana pada tanggal tersebut pada Pukul 00.00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946 Oeang Republik Indonesia (ORI) resmi berlaku.

ORI mulai resmi berlaku pada tanggal 30 Oktober 1946, namun terdapat beberapa lembaran ORI pertama yang tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945 hal ini menunjukan bahwa banyaknya kendala yang dialami dalam proses pembuatan, pencetakan dan peredaran ORI yang salah satunya adalah gangguan-gangguan dari Belanda atas peredaran ORI. Hal ini terjadi dikarenakan Belanda masih mencoba mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia dan masih menduduki sebagian wilayah Indonesia, hingga mengeluarkan mata uang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) pada 6 Maret 1946 yang akhirnya menambah inflasi dan melanggar kedaulatan Indonesia. Namun hambatan-hambatan tersebut tidak menyurutkan semangat rakyat untuk mendukung penggunaan ORI di wilayah Indonesia.

Dalam perjuangan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan hanya dilakukan dengan perang maupun diplomasi namun juga dalam bidang perekonomian. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia khususnya sebagai Insan Kementerian Keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam meneruskan perjuangan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsi yang kita laksanakan.

Dalam memeriahkan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-76 banyak sekali rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari webinar maupun seminar, *workshop*, berbagai kompetisi baik di bidang olahraga maupun kesenian, serta Upacara dan *Family Gathering* Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-76 dengan tema "Kemenkeu Satu: Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan".

Dalam *Family Gathering* Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-76 dengan tema "Kemenkeu Satu: Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan" yang dilaksanakan pada Sabtu, 29 Oktober 2022. Menteri Keuangan memberikan apresiasi kepada keluarga pegawai yang hadir pada kegiatan tersebut, dimana peran keluarga yang mendukung, mendorong dan membantu insan Kementerian keuangan untuk selalu bekerja secara maksimal dalam menjaga keuangan negara dan menggunakan keuangan negara untuk menjaga Indonesia dan berharap kerja keras seluruh insan Kementerian Keuangan dapat terus berlanjut untuk mengantarkan Indonesia menuju negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur.

Teks: Felix

Upacara Hari Oeang 2022

Juara 2 Turnamen Basket Putri HORI 2022

Juara 3 Ganda Putra Turnamen Badminton HORI 2022

Juara 3 Ganda Putri Tenis Meja HORI 2022

TT G20

Recover Together Recover Stronger

Liputan : Hafiz
Liaison Officer G20

Sudah tidak asing bagi kita ketika melihat logo berbentuk gunungan dengan motif kawung berwarna merah dengan tulisan bercorak biru di atas kata G20 Indonesia yang tak lain merupakan simbol dari presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Motif kawung siluet gunungan memiliki makna semangat menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama dengan gunungan yang bermakna perpindahan babak menuju pemulihan ekonomi dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun warna merah pada motif tersebut melambangkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan visi menuju pemulihan yang lebih baik, presidensi G20 Indonesia mengambil tema *Recover Together Recover Stronger*. Ada beberapa hal menarik yang patut diketahui mengenai presidensi G20 Indonesia tahun ini, mari kita simak bahasannya berikut.

Sejarah G20

G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari sembilan belas negara utama dan Uni Eropa. Forum tersebut adalah gabungan antara negara dengan kelas pendapatan menengah hingga tinggi dan negara berkembang hingga negara maju. Tujuan didirikannya forum tersebut adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 sendiri mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Adapun anggota G20 yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Jepang, Jerman, India, Indonesia, Inggris, Italia, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Forum G20 dibentuk pada tahun 1999 dengan diinisiasi oleh anggota G7. Pada awal periode pembetukannya, G20 merupakan forum bagi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota untuk mendiskusikan respons kebijakan dan memperkuat perekonomian dunia dalam menghadapi berbagai krisis yang berdampak global. Selanjutnya, pada 2008 di tengah krisis keuangan global, Amerika Serikat menginisiasi pertemuan kepala negara atau pemerintahan G20, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), yang semakin memperkuat relevansi G20 sebagai forum ekonomi utama dunia. Sejak 2010, pertemuan level menteri G20 semakin meluas, meliputi antara lain perdagangan, pertanian, ketenagakerjaan, dan luar negeri. Dengan perkembangan tersebut, saat ini G20 memiliki dua kelompok kerja, yaitu Jalur Keuangan (*Finance Track*) dan Jalur Sherpa (*Sherpa Track*). Jalur Keuangan terdiri atas kementerian keuangan dan bank sentral masing-masing negara, sementara Jalur Sherpa terdiri atas kementerian/lembaga lainnya yang relevan.

Presidensi G20

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan istilah yang awam didengar ketika memasuki bangku kuliah. Istilah ini bermakna tanggung jawab dan kepercayaan yang dipegang oleh elemen perguruan tinggi. Secara etimologi kata tri berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki makna tiga. Karena diserap dari Bahasa Sansekerta yang merupakan salah satu bahasa tertua dalam rumpun keluarga bahasa Indo-Eropa, kata tri tersebar dalam berbagai bahasa dalam rumpun keluarga bahasa tersebut dengan pergeseran pelafalan di masing-masing bahasa. Misalnya, dalam bahasa Spanyol *tres*, bahasa Inggris *three*, dan bahasa Latin *trio*. Kemudian, apa hubungannya dengan *Group of Twenty* atau lebih dikenal dengan G20?

Dalam presidensi G20, terdapat suatu pola kemitraan yang dikenal dengan istilah *troika*. Istilah ini memiliki hubungan dengan kata *tri*. *Troika* sendiri berasal dari Bahasa Rusia yang dapat diartikan bahwa presidensi yang dipegang oleh suatu negara anggota didukung oleh presidensi negara sebelum dan sesudah dari presidensi tahun tersebut. Pola ini membentuk tiga negara anggota yang tergabung dalam *Troika*.

Dalam presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, troika terdiri atas Italia sebagai presidensi tahun 2021, Indonesia sebagai presidensi tahun 2022, dan India sebagai presidensi tahun 2023. Pola ini terus berlanjut kepada presidensi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tanggal 15 November 2022 Indonesia secara resmi menyerahkan presidensi G20 tahun 2023 kepada India. Mulai 1 Desember 2022 India sudah siap menerima tampuk presidensi tersebut.

Selama tahun 2022 Indonesia memegang presidensi G20. Berbagai kegiatan dan pertemuan terlaksana dengan sangat baik dan lancar. Bahkan presidensi G20 Indonesia untuk pertama kali menyelenggarakan pertemuan G20 di banyak kota dalam sejarah pertemuan G20 sejak terbentuk. Tercatat sekitar 25 kota telah menjadi tuan rumah berbagai pertemuan G20. Beberapa di antaranya adalah Jakarta, Bali, Belitung, Magelang, Manokwari, dan Yogyakarta. Penetapan presidensi Indonesia diputuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Riyadh pada tahun 2020.

Tema yang diangkat pada presidensi tahun ini yaitu *Recover Together, Recover Stronger*. Alasan pemilihan tema ini adalah bahwa dalam keadaan perekonomian dunia yang masih dalam terdampak Covid-19 dan seluruh negara perlu bergerak bersama mencapai pemulihan dunia. Hal ini antara lain dilakukan melalui koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan.

Kerja sama dan koordinasi yang erat diharapkan tidak hanya akan mampu mendukung dunia untuk keluar dari krisis secara merata, tetapi juga akan menghasilkan pemulihan yang lebih berkualitas dalam jangka panjang. Adapun kepanitian nasional G20 diketuai oleh Presiden Republik Indonesia serta Wakil Presiden Republik Indonesia dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pertemuan G20

Selain anggota penuh, pertemuan G20 juga dihadiri oleh negara atau organisasi internasional yang sengaja diundang ataupun merupakan undangan permanen. Dalam hal ini undangan permanen ditujukan kepada Spanyol. Adapun undangan lain pada presidensi Indonesia 2022 antara lain Singapura, Swiss, Ghana, dan Belanda. Di samping itu, terdapat juga beberapa organisasi internasional yang diundang terutama organisasi internasional yang menangani isu-isu yang sedang dibahas dalam presidensi G20. Beberapa organisasi internasional tersebut antara lain *World Bank Group*, *International Monetray Fund* (IMF), *World Health Organization* (WHO), UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ketua organisasi regional seperti *Association of South-East Asian Nations* (ASEAN), *African Union*, dan *The New*

Partnership for Africa's Development (NEPAD).

Jenis pertemuan selama kegiatan presidensi G20 sangat beragam. Mayoritas masyarakat mengenal pertemuan G20 sebagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang menghadirkan kepala negara atau kepala pemerintahan. KTT G20 sendiri merupakan puncak dari berbagai pertemuan presidensi G20 yang telah selesai dilaksanakan. Selain KTT, pertemuan-pertemuan antara lain Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi yang diadakan di masing-masing area fokus utama forum dan kelompok kerja/*Working Groups* yang beranggotakan para ahli dari negara G20. Working Groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya pada KTT.

Pada Jalur Keuangan, Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, yang disebut *Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings* (FMCBG). Sementara itu. pertemuan para deputi disebut *Finance and Central Bank Deputies Meetings* (FCBD). Pertemuan Tingkat Menteri tersebut tidak hanya terikat pada permasalahan ekonomi dan keuangan, tetapi juga isu lain yang patut dibahas dan didiskusikan melalui pertemuan G20, seperti Pertemuan Menteri Kebudayaan, Pertemuan Menteri Pembangunan, dan Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup. Pertemuan ini tidak hanya terbatas pada satu menteri yang membawahi suatu isu, tetapi juga dapat dibahas dengan melibatkan beberapa menteri yang menaungi atau dikenal dengan *Joint Minister Meeting*.

Terdapat juga beberapa *Engagement Groups* 20 yang merupakan forum dialog G20 dengan komunitas-komunitas tertentu. Beberapa di antaranya adalah Business 20 (B20) yang merupakan forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis guna memberi rekomendasi kebijakan konkret terkait agenda-agenda prioritas, untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Think 20 (T20) yang mewadahi *think tank* dan lembaga riset dari seluruh dunia. Riset dan proposal kebijakan yang disusun diharapkan dapat berkontribusi pada isu-isu terkait tata kelola pemerintahan, dan *Youth* 20 (Y20) yang diselenggarakan guna memberi wadah orang-orang muda dalam mengekspresikan visi dan ide untuk disampaikan kepada kepala negara atau pemerintahan G20 dalam KTT.

Puncak dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah KTT G20 yang diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 November 2022 dan bertempat di Hotel Apurva Kempinski Bali. Agenda pelaksanaan KTT antara lain konferensi tingkat kepala negara atau pemerintahan, Gala Dinner di Taman Garuda Wisnu Kencana, dan kunjungan para pemimpin negara ke hutan *mangrove* di Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Penutupan presidensi G20 Indonesia tahun 2022 secara resmi dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan penyerahan presidensi G20 tahun 2023 kepada Perdana Menteri India.

OUTPUT TRANSFORMERS

Aksi Transformasi Set.PP yang menjadi salah satu langkah menuju perubahan telah berjalan selama hampir satu tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor KEP-12/SP/2022 tanggal 12 Februari 2022 tentang Tim Transformasi Proses Bisnis, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Segenap tim dengan arahan langsung dari Sekretaris Pengadilan Pajak dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak, telah merumuskan berbagai ide dan kajian terkait modernisasi di Set. PP. Apa saja sih hasil yang telah dicapai dari tim yang lebih familiar kita sebut sebagai Tim Transformers ini?

Aksi yang pertama yaitu Aksi Pembangunan Sistem Informasi e-Tax Court. Per Bulan November 2022, pengembangan aplikasi *e-Tax Court* telah 100% selesai dilakukan. Sepanjang Bulan November 2022 Tim Pengembang yang dipunggawai oleh para pegawai dari Bagian TIK telah melaksanakan proses Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) yang menargetkan para pegawai, mulai dari fitur *e-registration* hingga test fitur pejabat administrator dan UAT dengan para pimpinan. Selanjutnya telah direncanakan sosialisasi yang didukung oleh Subbagian Informasi dan Publikasi, dengan *timeline grand launching* pada tanggal 12 April 2023, bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Pengadilan Pajak.

Kedua, Aksi Regulasi Modernisasi Pengadilan Pajak. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 oleh Mahkamah Agung pada tanggal 10 Oktober 2022 lalu, Aksi Regulasi Modernisasi Pengadilan Pajak dapat dengan segera menindaklanjutii penyusunan draft Peraturan Ketua Pengadilan Pajak tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan di Pengadilan Pajak secara Elektronik. Pada Bulan November 2022 telah dimulai pembahasan *draft* Peraturan Ketua Pengadilan Pajak tersebut dengan rencana finalisasi dilakukan pada Bulan Desember 2022.

Pada Aksi ketiga yaitu *Benchmarking* Modernisasi Pengadilan Pajak, yang rencana awalnya akan dilakukan terhadap 5 (lima) negara yaitu Singapura, Hongkong, Belgia, Jepang dan United Arab Emirates (UAE), saat ini terdapat beberapa penyesuaian utamanya pada pelaksanaan studi banding. Dikarenakan terdapat pembatasan dinas luar negeri, studi banding dilaksanakan di dalam negeri

Perubahan
Amran Yunus

yaitu ke PTUN dan PT TUN Makassar, sedangkan untuk kelima negara di atas telah dilakukan studi literatur. Studi banding dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 November 2022, yang melibatkan segenap tim yang terdiri dari unsur pimpinan, subtim *benchmarking*, serta tim pengembang. Hasil dari studi banding ke Makassar yaitu referensi regulasi dan manajemen perubahan.

Selanjutnya, Aksi Profiling Sengketa Pajak yang merupakan aksi penting bagi penanganan sengketa pajak. Pada aksi ini, setelah dilaksanakan pengembangan SDM terkait data analitik dan penyusunan laporan pada Bulan Juli sampai dengan Oktober 2022, terdapat rencana kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan DJP dan DJBC pada Bulan Desember 2022 yang akan membahas tentang perlakuan PPN. Penyusunan Laporan Kajian *Profiling* Sengketa sendiri akan disampaikan pada Bulan Januari atau Februari 2023.

Aksi yang kelima, yaitu Pengurangan Dokumen Fisik. Tiga poin utama pada aksi ini yang pertama adalah penyusunan kajian mengenai pengurangan berkas fisik menuju dokumen digital, yang rencana digitalisasinya telah diakomodir juga pada pengembangan e-Tax Court. Poin kedua terkait Jadwal Retensi Arsip dengan posisi saat ini arsip di kantor Semanan akan diverifikasi agar dapat terpisah antara Putusan PP dan Putusan PK, hingga direncanakan tahun depan akan dilakukan oleh vendor agar pelaksanaan lebih efektif. Poin ketiga terkait Program Jumat Bersih yang telah dilaksanakan setiap bulannya.

Aksi berikutnya yaitu aksi keenam, Manajemen Pemberkasan Sengketa Pajak, yang telah menghasilkan output berupa Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor SE-1/SP/2022 tentang Prosedur Penatausahaan Putusan Pengadilan Pajak untuk menyeragamkan pemberkasan sengketa oleh Majelis. Selain itu, sembari menunggu implementasi aplikasi e-Tax Court, telah dibuat *dashboard monitoring* berkas sengketa menggunakan *google studio* untuk memonitor posisi berkas sengketa dan mengatasi *bottle neck* dalam penyelesaian berkas PK.

A**ksi berikutnya Penataan Ruang Kerja,** telah mencapai seluruh target aksi yaitu penyelesaian penataan ruang TPT pada bulan Januari 2022, penataan dua ruang kerja piloting yaitu ruang kerja Bagian ASP dan Majelis XIX, yang telah selesai dilaksanakan pada Bulan April 2022, serta perwujudan ruang kerja kolaboratif yang selesai di Bulan Juli 2022. Saat ini sedang dilakukan penataan ruang kerja kolaboratif, dibantu oleh Tim Perspektif agar semakin nyaman digunakan sebagai area ABW oleh para pegawai.

Aksi terakhir yang tak kalah penting dari ketujuh aksi lainnya, Penguatan Sumber Daya Manusia. Telah dihasilkan Digital Signature (DS) lengkap (BSSN dan BPPT) untuk 33 Hakim berstatus ASN, kemudian DS BPPT untuk enam belas Hakim non ASN, dan yang belum memiliki DS tinggal sembilan Hakim. Selain itu telah diajukan program *secondment* dengan instansi tujuan Mahkamah Agung, dan telah dilakukan persiapan pelaksanaan *Assesment Center* (AC) dengan sosialisasi AC pada level Sekretariat Pengadilan Pajak dan sosialisasi persiapan AC pada lingkup Sekretariat Jenderal. Terkait dukungan pada pengembangan e-Tax Court, telah dilaksanakan diklat pengembangan kompetensi bagi pengembang aplikasi bekerja sama dengan Inixindo.

Teks: Mutia

INTEGRITAS

Hoegeng Imam Santoso

Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, tim TC Media menyusun artikel khusus terkait Tokoh Integritas. Siapa tokoh integritas yang akan dibahas pada edisi kali ini? Yuk kita simak!

Bicara mengenai integritas maka kita tidak boleh melewatkan tokoh yang satu ini, Hoegeng Imam Santoso. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ke-5 dan dikenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat luas. Bahkan mantan Presiden ke-4 Republik Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid, pernah melemparkan pernyataan di salah satu forum terbuka pada tahun 2006 silam yang menyatakan bahwa hanya ada tiga polisi jujur yaitu patung polisi, polisi tidur dan Polisi Hoegeng.

Hoegeng sendiri lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921, merupakan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 1966-1971. Hoegeng merupakan Kapolri yang dipandang sebagai Kapolri paling jujur, artinya bersih dari KKN, pantang tergoda dengan suap, tidak bergeming dengan rayuan dan tegas pada keputusan yang dibuat.

Cerita yang paling terkenal adalah pada saat Hoegeng dan keluarganya mendapat sebuah kejutan besar ketika beliau diangkat menjadi Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada tahun 1956. Sempat menginap di Hotel De Boer selama beberapa waktu karena rumah dinas tersebut masih dihuni pejabat lama, Hoegeng sangat terkejut saat tiba giliran menempati rumah tersebut. Rumah dinas itu dipenuhi barang-barang mewah.

Hoegeng tidak bisa menerima hal tersebut. Ia dan keluarganya bersikeras untuk tetap tinggal di hotel jika barang-barang mewah itu masih ada di sana. Mereka baru akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya, Hoegeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Menurut Hoegeng, keberadaan barang-barang mewah itu sangat mencurigakan, karena mereka belum mengenal siapapun di tempat baru tersebut. Kemudian diketahui bahwa barang- barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya.

Dari Hoegeng kita dapat belajar tentang Kepemimpinan dan Integritas. Nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan dalam kepemimpinannya yang paling penting adalah tentang kejujuran, kesetiaan pada kebenaran, menjunjung tinggi nilai profesionalitas dan kecintaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Hal-hal tersebut menjadi pelajaran yang bernilai bagi kita.

Jadi bagaimana dengan kita?

Teks: Felix

Res Judicata Pro Veritate Habetur

"Apa yang diputus Hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan."

Oleh: Dr. Budi Nugroho, S.E., M.Hum

Namun demikian harus dipahami bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak tanpa pertanggungjawaban. Kemandirian peradilan bukanlah kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapi kemandirian yang didasarkan oleh norma yuridis, kode etik profesi, dan norma moral.

"Terima kasih yang mulia"

Sebutan "Yang Mulia" merupakan sapaan yang umum diajukan oleh para pihak yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam persidangan. Sebutan itu jamak pula didengar ketika di luar persidangan, umumnya dengan nada hormat dan santun, walaupun kadang ada juga yang dengan nada berseloroh.

Prof. Jimly Asshiddiqie yang pernah menjadi ketua salah satu puncak kehakiman di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa sebutan itu sebaiknya cukup diajukan di ruang sidang saja. Bahkan eks Ketua MA, Harifin Tumpa, malah mengharap agar tidak perlu lagi menggunakan panggilan "Yang Mulia" ditujukan ke hakim. Perpahi (Persatuan Purnabakti Hakim Indonesia) malah secara resmi mengajukan surat kepada Ketua Mahkamah Agung agar tidak perlu lagi menggunakan sebutan "Yang Mulia" bagi hakim.

Lantas sebenarnya bagaimana mestinya menggunakan sebutan tersebut? Pengaturan mengenai sebutan "Yang Mulia" tidak didapati dasar hukumnya dalam beracara di peradilan umum. Beberapa pengadilan negeri mencantumkan keharusan menyebut hakim dengan sapaan itu dalam laman resminya.

Peraturan tentang hal yang sama juga tidak didapati pada tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di lingkungan Pengadilan Pajak, hal itu diatur dalam Pasal 13 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-003/PP/2016 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa para pihak, saksi, ahli, ahli alih bahasa, dan pengunjung sidang wajib menyebut seorang hakim dengan sebutan yang mulia.

Setelah adanya penahaan KPK atas seorang hakim agung karena perkara korupsi pada Bulan September lalu, penyebutan hakim sebagai Yang Mulia kembali menuai banyak komentar. Terlepas dari pro dan kontra mengenai hal tersebut, banyak pihak mengatakan bahwa sebutan Yang Mulia bagi hakim ditujukan agar para hakim senantiasa memegang kode etik dalam menjalankan tugasnya. Sebutan tersebut bermakna sebagai pengingat bagi hakim bahwa setiap putusan yang dibuatnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Mulia.

Hakim secara tradisional harus memutus dengan keyakinan, dan keyakinan yang paling dalam adalah

keyakinan pada hati nuraninya sendiri berdasarkan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu pulalah yang dijadikan pegangan dalam upacara pengucapan sumpah jabatan hakim.

Putusan didasarkan pada keyakinan hakim merupakan syarat utama dari peradilan yang independen. Telah dipahami bahwa tanpa peradilan yang independen, tidak ada negara hukum. Keyakinan hakim adalah sebuah ruang yang harus dibangun, dikembangkan, dan dilaksanakan sebagai ornamen ilmu dan agama dalam upaya pencari keadilan substantif.

Peradilan yang independen salah satunya ditunjukkan dengan adanya kebebasan hakim. Prinsip itu membawa konsekuensi imunitas hakim. Komisi Yudisial pun tidak boleh mencampuri subtansi dari putusan Hakim, termasuk argumentasi yang diberikan dalam putusannya. Hakim tidak dapat dimakzulkan atas dasar putusan yang dikeluarkannya. Hakim tidak bisa diberhentikan karena putusan yang dibuatnya. Bahkan Mahkamah Agung sebagai lembaga induk para hakim pun juga tidak diperkenankan untuk memeriksa materi argumentasi putusan hakim. Kekuasaan kehakiman adalah sesuatu yang sakral. Tak boleh disentuh (***untouchable***) oleh siapapun.

Pengadilan Pajak sebagai penentu pajak yang berkeadilan di negara Pancasila, perlu memahami makna kebebasan yang diemban itu. Mengingat peradilan pada dasarnya adalah lembaga hukum dan Pengadilan Pajak merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir maka hakim Pengadilan Pajak harus benar-benar memahami norma yuridis. Pemahaman hukum sebagai suatu teori atau ilmu akan menentukan pertimbangan putusan yang merupakan mahkota hakim. Yahya Harahap mengatakan bahwa Kebebasan hakim harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum.

Namun demikian, berkaitan dengan kebebasan hakim, harus dipahami bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak tanpa pertanggungjawaban. Kemandirian peradilan bukanlah kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapi kemandirian yang didasarkan oleh norma yuridis, kode etik profesi, dan norma moral. Ketika menyidangkan dan memutuskan perkara, hakim sebagai bagian dari profesi yang mulia (***officium nobile***) beratribut kekuasaan kehakiman mengemban beban moral bangsa: bertanggung jawab kepada Tuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa putusan yang diambil oleh hakim harus dapat dipertangungjawabkan kepada Tuhan bermakna bahwa hakim tidak dapat disalahkan atas apa yang telah diputuskannya itu. Putusan pengadilan harus dianggap benar. Pada peradilan umum, dalam hal putusan pengadilan tingkat banding ternyata berbeda dari putusan pengadilan tingkat pertama, tidak berarti hakim pengadilan tingkat pertama dianggap telah melakukan kesalahan. Inilah yang dimaksud dengan asas ***Res Judicata Pro Veritate Habetur***, apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Semua pihak harus menerima putusan pengadilan sebagai kemestian.

Hakim berfungsi untuk mengakhiri sengketa. Salah satu hal penting dalam negara hukum adalah bahwa apabila masyarakat memiliki perkara, maka negara telah menyediakan sarana untuk menyelesaikkannya secara murah, sederhana dan cepat. Lembaga peradilan dengan para hakimnya memastikan perkara itu diselesaikan. Apakah putusan itu adil? Apakah putusan itu memuaskan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat? Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan itu karena putusan pengadilan selalu dapat dilihat dari berbagai sisi berbeda. Pihak yang kalah, wajar untuk menilai bahwa suatu putusan itu tidak adil. Namun yang pasti, perkara itu harus ada akhirnya.

Semua pihak harus menghormati putusan yang telah diambil hakim, dan perkara itu harus selesai. Putusan pengadilan harus dilaksanakan sebagai akhir dari penyelesaian suatu perkara, meski nilai keadilannya tetap dapat menjadi pro-kontra. Maka hakim yang memutus perkara itu yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan sesuai irah-irah yang menyatakan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Maka sunguh sangat lega bila setelah selesai pembacaan suatu putusan, para pihak baik yang menang maupun yang kalah semua mengucapkan: “Terima kasih Yang Mulia”.

Data Kepegawaian Set. PP 2022

Tahun 2022 merupakan tahun dimana ada banyak perubahan dalam susunan kepegawaian di Set. PP. Perubahan terjadi disebabkan adanya mutasi internal, mutasi masuk, mutasi keluar, pegawai yang kembali dari tugas belajar, pegawai yang berangkat tugas belajar, pegawai yang kembali dari cuti di luar tanggungan negara, pegawai yang pensiun, pegawai yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, dan pegawai yang meninggal. Berikut merupakan infografis data kepegawaian Set. PP tahun 2022.

167 wanita

259 pria

147 genX

203 genY

76 genZ

2 es2

43 es3

90 es4

291 pelaksana

Data Pergerakan Pegawai

30
Mutasi internal

7
Mutasi masuk

12
Mutasi keluar

2
Kembali tugas belajar

4
Berangkat tugas belajar

1
Kembali CLTN

1
Pemberhentian dengan hormat

3
Pensiun

4
Meninggal Dunia

Selamat Datang di Set. PP

Farchan Ilyas
SP Majelis XVIIIB

Rustiyono
SP Majelis XIVB

Yosef Hendriyansah
SP Majelis VIIA

Mohamad Satria Efendi
Kabag TIK

Ika Fitria Pasurya
Kasubbag OSDM

Rahadyan Andriyanto
Pelaksana Majelis IB

Rizky Fadilla Fitriyanti
Pelaksana Majelis IIB

Teks
Dhilla

Ilustrasi
Astris

EMPLOYEE OF THE MONTH

EOM SEPTEMBER 2022 – Laurentius Yosi Amanto

LAURENTIUS YOSI AMANTO, atau yang biasa dipanggil Yosi "*Wuiiiiih* EOM" sejak terpilih menjadi EOM bulan September, selalu menanggapi "*apaan siiihhh*" jika berpapasan dengan pegawai Set. PP. Namun menurut Yosi, perasaan yang paling mengganggu adalah saat wajah *kucel* berminyak (seperti gambar di samping) muncul pada *wallpaper* perangkat PC kantor selama hampir sebulan.

"Pertama-tama, itu sebulan banget dong. *Wallpaper* Audrey (EOM Oktober) aja cuma beberapa hari. Beberapa hari berikutnya sudah berganti dengan gambar lain. 'Beruntung' sekali Audrey. Yang kedua, kalau foto yang jadi *wallpaper* adalah foto ganteng seperti *Nicsap*, walaupun sedikit berminyak, mungkin masih oke. Tapi saya kan bukan *Nicsap*, lebih ke alap-alap kali ya."

Yosi merasa, baginya yang sudah menjadi pelaksana di APKD selama lebih kurang tujuh tahun, penempatan wajah dalam *wallpaper* lebih seperti *punishment* daripada *reward*. "Kalau boleh memilih, mending tidak ada *wallpaper*-an lah. Mana tidak ada *quote* atau *added value* lain. Selain itu, pengambilan gambar seperti foto model yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya juga tidak dilakukan lagi. Masih ingat kan, bahkan ketika awal-awal pandemi, ketika suasananya masih super parno dan prokes tidak selonggar sekarang, pengambilan foto justru dilakukan. Jadi mungkin saat ini ada kebijakan lain kenapa foto yang digunakan dalam *wallpaper* adalah stok foto berbatik itu".

"Saya ingat waktu itu (acara virtual puncak peringatan HUT 20 tahun PP) yang jadi *talent* foto adalah Pak Aman. Beliau sengaja dipakein jilbab untuk mengecoh orang-orang. Mana *puzzle* yang dibuka sedikit-sedikit. Idenya kreatif, salut untuk panitianya. Bikin kita semua terkecoh dan terhibur. Coba aja *wallpaper* PC/laptop kantor bisa dibuat seperti itu. Jadi misalnya hari pertama, *puzzle* yang dibuka adalah bagian mata, sedangkan bagian lain ditutup. Hari kedua, bagian *puzzle* yang dibuka adalah bagian pipi, dan seterusnya. Jawaban bisa dikumpulkan melalui *platform* tertentu. Dan mudah-mudahan fotonya tidak pakai stok foto berbatik itu lagi. Tapi ini hanya usul saja sih, siapa tahu bisa jadi masukan. Kalau disetujui, sepertinya akan seru, tapi konsekuensinya tentu akan ada pihak-pihak yang direpotin juga ya."

Pokoknya, selamat atas terpilihnya Yosi sebagai EOM September 2022, semoga saran dan masukan Yosi bisa terwujud, ya! ***Cheers~***

EOM Oktober 2022 - Audrey Ruth Sahanaya

Audrey, begitulah dia biasa dipanggil. Saat Audrey diberi pertanyaan mengenai perasaannya Ketika terpilih menjadi EOM, Audrey mengaku agak kaget karena hanya mendengar dari rekan seruangannya karena kebetulan sedang menjalani tugas di luar kota. Audrey mengaku masih belum terlalu fokus, namun tetap bersyukur dan berterimakasih untuk semua pihak dan teman-teman yang sudah memberikan dukungan.

Audrey bercerita bahwa motivasi dalam bekerja adalah ingin belajar lebih banyak dan mencoba menguasai tugas dan fungsi yang saat ini sedang dikerjakan. Audrey merasa masih belum terlalu banyak belajar karena baru mau memasuki tahun ke-lima dalam bekerja.

"Karena menurut saya, untuk bisa membuat perubahan, sekecil apapun *scope* perubahannya, harus terlebih dahulu memahami dan menguasai proses bisnis pekerjaan yg dikerjakan. Apalagi sekarang Set. PP mulai masuk ke era transformasi digital, jadi pasti makin banyak yang masih harus dan bisa dipelajari, jadi, lagi *learning by doing* aja. Pokoknya ketika kita merasa *everything is under control*, kayaknya berarti malah kita yang sebenernya belum membuka mata dan peka dengan lingkungan sekitar, soalnya sekarang kita semua lagi ga berdiam, jadi harus tetap terpacu untuk bergerak terus mengikuti perkembangan."

Ketika ditanyakan kepada pihak-pihak mana saja Audrey ingin mengucapkan terima kasih atas pencapaian EOM ini, dia berkelakar, "Terima kasih banyak buat diriku. *Hahahahha Canda*", dan dilanjutkan dengan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan satu tim. "Terima kasih buat temen-temen peer di Majelis VIII B atau yang bahkan sudah pindah khususnya, Mas Andri, Mas Freddy, Mas Andros, Mba Falin, Mas Bagus, Aryan, yang sudah sabar mau mengajarkan hal-hal baru dari dulu, dan sudah mau jadi penawar suntuk juga di jam-jam tertentu. Untuk SP dan PSP di Majelis VIII B, Bu Wiwied, Mas Joko, Mba Tata, yang terus mau mendukung apapun itu yang saya kerjakan & lakukan."

Sebagai penutup pembicaraan dengan pegawai yang juga setahun belakangan aktif menjadi LO Kegiatan G20 ini, Audrey memberikan *quote* favoritnya: "Menurutku, sesuai kata Steve Jobs, yang masih berusaha ku amini, pekerjaan itu udah ngambil porsi waktu terbesar dalam hidup. Jadi, *unless you really like what you do, keep looking, and never settle. You know your limits best*. Kalau ditanya *quote* favorit penyemangat bekerja, "*Even if you're on the right track, you'll get run over if you just sit there*." Yok mangat yoooook gitu intinya."

Semoga sukses dan selalu semangat, Audrey!

Resesi Ekonomi 2023

Apakah berlaku untuk Indonesia?

Resesi ekonomi adalah kondisi saat perekonomian negara memburuk. Kondisi resesi dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Salah satu hal yang menjadi perhatian publik saat memasuki tahun 2023 adalah terkait dengan kondisi perekonomian dunia yang diprediksi akan memasuki momen resesi. Dalam salah satu jumpa pers, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi gelombang resesi ekonomi. Pernyataan ini tentunya memicu banyak pertanyaan terkait dengan peluang terjadinya prediksi tersebut ataupun langkah dalam mengantisipasinya. Namun sebelum membahas lebih jauh, mari kita memahami secara umum seluk beluk daripada resesi ekonomi tersebut.

Resesi ekonomi adalah kondisi saat perekonomian negara memburuk. Kondisi resesi dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Menilik dari daftar syarat, suatu kondisi perekonomian dapat digolongkan mengalami resesi perekonomian ialah angka pengangguran yang meningkat. Kondisi tersebut secara nyata mulai terjadi pada beberapa start up yang mengembangkan proses produksinya di Indonesia dimana pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat dihindari.

Berdasarkan data dari BPS apabila dilakukan perbandingan persentase tingkat pengganggguran terbuka (suatu pengganggguran yang memiliki kemampuan pendidikan dan usia produktif untuk bekerja) mengalami penurunan apabila dibandingkan antara Februari 2021 dengan Februari 2022. Hal ini menjadi suatu hal yang

positif, hingga pada akhir akhir tahun ini dengan ditemukannya beberapa perusahaan yang melakukan perampingan hingga harus melakukan PHK atas karyawannya.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya keterbatasan daripada kemampuan daya beli masyarakat yang disertai dengan faktor lainnya seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan beberapa isu internasional lainnya seperti perubahan iklim dan perang Rusia-Ukraina. Ketika kemampuan daya beli masyarakat menurun, maka masyarakat akan lebih selektif dalam penggunaan uangnya dengan berfokus pada kebutuhan primer terlebih dahulu. Tentunya hal ini harus ditilik kembali dalam skala makro maupun skala mikro karena argumen tersebut tidak berlaku bagi setiap level ekonomi masyarakat.

Dari sisi ekonomi makro, berdasarkan siaran Pers pada Bulan Oktober lalu, terdapat beberapa kondisi yang dimiliki Indonesia sebagai modal dasar dalam menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2023. Pertama, pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut ditengah perlambatan pada banyak negara yang ditandai dengan positifnya nilai kinerja APBN September 2022, dimana segala ketidakpastian dan risiko akibat tekanan global tetap harus diwaspadai dan dimitigasi.

Kedua, kinerja ekonomi Indonesia masih tumbuh kuat. Hal ini tercermin dari surplus neraca perdagangan sebesar USD4,99 miliar. Selanjutnya pendapatan Negara Melanjutkan Kinerja yang Baik. Saat ini Pendapatan Negara Indonesia saat ini masih didominasi dari penerimaan pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan terakhir kinerja PNBP sampai dengan akhir September 2022 terlah mencapai 89,6% dari target yang diberikan.

Tentunya fakta diatas tidak serta merta menjadikan kita sebagai masyarakat berdiam diri tanpa berkontribusi. Hal ini dikarenakan banyak hal yang terkait dengan pola perilaku para pelaku ekonomi yang tidak dapat ditebak. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia tetap perlu melakukan beberapa langkah preventif yang kiranya dapat menjadi kontribusi tidak langsung bagi ketahanan perekonomian Indonesia khususnya pada tahun 2023.

Dalam hal ini terdapat beberapa langkah yang dapat diimplementasikan oleh kita dalam menghadapi kondisi perekonomian, apapun kondisinya.

Pertama, identifikasikan pos – pos pengeluaran. Dalam praktiknya, saat ini penulis membuat excel khusus yang dimana terdapat beberapa kategori terkhususnya pengeluaran kebutuhan pokok menjadi fokus utama. Pastikan pembaca dapat menilik setiap bentuk pengeluaran baik dalam bentuk nominal yang dikeluarkan maupun persentase jika dibandingkan dengan total pengeluaran. Hal ini tentunya juga dapat menjadi pengingat kita seberapa konsumtif kita dalam kaitannya dengan pengeluaran.

Kedua, investasikan sebagian dari penghasilan anda. Mungkin banyak dari pembaca yang menerapkan alokasikan pengeluaran terlebih dahulu, sisanya baru diinvestasikan. Mari kita coba sesuaikan terlebih dahulu kebiasaan ini. Menurut penulis, saat ini menempatkan investasi terlebih dahulu merupakan langkah preventif terbaik ke depannya. Oleh karenanya, alokasikan investasi anda terlebih dahulu (misalkan 10-30% dari penghasilan) dan kemudian kebutuhan disesuaikan dengan sisa yang diperoleh setelah alokasi investasi dilaksanakan. Dalam proses pemilihan jenis investasi yang akan dipilih, kita tetap harus mempertimbangkan imbal hasil yang diperoleh, pajak yang dikenakan, dan juga kemudahan dalam pencairan investasi yang kita lakukan (liquidity dari investasi). Lebih lanjut, pilihan daripada produk investasi hendaknya disesuaikan dengan tipe investor dari masing masing orang, apakah anda tergolong ***risk taker*** atau *risk avers*.

Terakhir, mulai mencari alternatif tambahan penghasilan selain gaji tetap. Tambahan penghasilan ini dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan daripada dana darurat apabila terjadi resesi ekonomi ke depannya. Umumnya dana darurat yang disiapkan adalah enam kali dari pengeluaran rutin (bagi yang *single*) atau dua belas kali dari pengeluaran rutin (bagi yang telah berkeluarga).

Pada akhirnya, resesi ataupun tidak pada tahun 2023 nantinya, masyarakat yang bersiap akan memiliki daya tahan yang berbeda daripada mereka yang tidak terinformasikan dan dipersiapkan sejak dini. Mari kembali menjadi seperti masyarakat yang pernah digaungkan Bapak Soekarno, yaitu masyarakat yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri.

Teks: Tirta

Bitcoin
pexels.com

Cryptocurrency

Legal ga ya?

Beberapa negara di dunia telah memberikan izin terhadap perdangangan *cryptocurrency* atau mata uang digital, salah satu negara yang telah memberikan izin perdagangan mata uang digital adalah Indonesia.

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang digunakan sebagai alternatif mata uang. *Cryptocurrency* sendiri dihasilkan dan diperdagangkan melalui proses kriptografi. Adapun jenis kriptografi yang dipakai untuk pengamanannya adalah algoritma Blockchain.

Kebanyakan dari *Cryptocurrency* tersebut bersifat desentralisasi dalam jaringan berbasis komputer dan berdasarkan pada teknologi *peer-to-peer* dan kriptografi *open source* yang tidak bergantung pada otoritas pusat seperti bank pusat atau institusi administratif lainnya.

Sejarah *Cryptocurrency*

Penggunaan *Cryptocurrency* pertama kali tercatat pada tahun 2009 yaitu mata uang yang dikenal dengan nama Bitcoin. Mata uang tersebut ditemukan oleh seseorang atau sekelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto dalam publikasi yang berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*".

Pada mulanya Bitcoin berharga kurang dari Rp10.000,- hingga Februari 2011, namun kemudian meningkat pesat. Sejak kemunculan Bitcoin, kemudian bermunculan *Cryptocurrency* lainnya seperti Ethereum, Ripple dan Litecoin dengan mekanisme dan harga yang berbeda-beda. Hingga saat ini, terdapat ratusan *Cryptocurrency* yang ada dan dapat bertambah kapan saja.

Pertambahan jenis mata uang tersebut juga kemudian diiringi dengan peningkatan *Market Capitalization* seluruh *Cryptocurrency*. Pada April 2013 *Market Cap* seluruh *Cryptocurrency* berada pada kisaran USD 1,6 miliar, kemudian terjadi peningkatan menjadi sekitar USD 17 miliar pada Januari 2017. Untuk nilai Bitcoin itu sendiri pernah menyentuh angka 1 Milyar pada November 2021 namun sayangnya nilai tersebut terus mengalami penurunan nilai hingga seharga 300 jutaan untuk 1 Bitcoin (Juni 2022).

Algoritma yang digunakan pada Cryptocurrency

Algoritma *Blockchain* adalah algoritma yang sebgaian besar digunakan oleh perusahaan *cryptocurrency* untuk mengamankan transaksi keuangan mereka. Adapun *Blockchain* itu sendiri merupakan teknologi seperti *ledger* (buku besar) atau basis data karena menyimpan segala informasi pertukaran data, seperti mata uang digital hingga data penting lainnya. *Blockchain* itu sendiri memiliki tiga bagian komponen yaitu *block*, *chain* dan *network*.

Blockchain tersusun dari banyaknya *block* yang merupakan representasi untuk sebuah daftar transaksi yang sah dan disimpan. Setiap *block* memiliki sebuah hash kriptografis sebagai *pointer* atau sebagai identitas setiap *block* supaya dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Struktur dari sebuah *block* terdiri dari *header* kemudian diikuti dengan metadata dan daftar transaksi yang disimpan.

Komponen kedua adalah *Chain*. Supaya setiap *block* pada *Blockchain* saling terhubung, diperlukanlah "rantai" dalam bentuk hash yang menghubungkan antara satu *block* dengan *block* lainnya. Mekanisme hash merupakan salah satu konsep yang kompleks secara matematis untuk diterapkan pada *Blockchain*.

Komponen terakhir yaitu *Network* atau jaringan. *Network* pada *Blockchain* merupakan representasi dari banyaknya *nodes* atau komputer yang saling terhubung satu sama lain dan menjalankan sebuah algoritma untuk mengamankan jaringan. Karena setiap *Node* menyimpan informasi pada *block* yang dikirim, maka perlu menentukan jenis komunikasi *network* yang bersifat aman, oleh karena itu metode komunikasi *network* yang dipilih adalah *peer to peer*.

Jenis Cryptocurrency

Beberapa negara di dunia telah memberikan izin terhadap perdangangan *cryptocurrency* atau mata uang digital, salah satu negara yang telah memberikan izin perdagangan mata uang digital adalah Indonesia. Izin perdagangan mata uang digital di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hingga bulan Juni 2022 ada sekitar 219 aset *cryptocurrency* yang di ijinkan oleh Bappebti, diantaranya adalah Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/Ripple, Bitcoincash, Binance Coin, Polkadot, Chainlink, Lightcoin, dan Neo.

Teks: Irfan

Gimana 2022 Kalian?

Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2022. Tahun ini perubahan yang cukup mencolok di Set.PP adalah banyak kegiatan yang diselenggarakan secara langsung, baik kegiatan olahraga, seminar maupun Capacity Building. Pada kesempatan kali ini Tim TCMedia menanyakan melalui Cerita Instagram TCMedia (**@tcmedia_pp**) kepada SobatPP bagaimana 2022 sejauh ini, dan berikut jawaban SobatPP.

Wah seru sekali jawaban SobatPP ya. Ada yang bersyukur di tahun 2022 ini karena banyak kegiatan bisa terlaksana kembali secara *offline*. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang patut kita syukuri, namun kita tetap tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan ya.

Selain itu juga ada SobatPP yang 2022-nya dipenuhi dengan "rapat rapat rapat". Tentunya rapat yang dilakukan ini sangat berguna dalam menunjang kinerja serta mewujudkan visi dan misi organisasi ya. Terima kasih atas segala kontribusi dari SobatPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

SobatPP tentunya juga merasa lelah dan seperti menaiki *roller coaster* dalam menjalani 2022 ini, namun SobatPP sudah luar biasa karena bisa melaluinya dengan baik. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, tetap semangat ya.

Semua cerita suka, duka, keluh kesah, dan syukur telah dilalui pada tahun 2022 ini. Semoga tahun 2023 semua harapan dan kerja keras yang telah dilalui SobatPP dapat terwujud.

"May in 2023 all of your dreams turn into reality and all your efforts turn into great achievements."

Teks: Felix

It's TACO Time!

SIMPAN SAJA

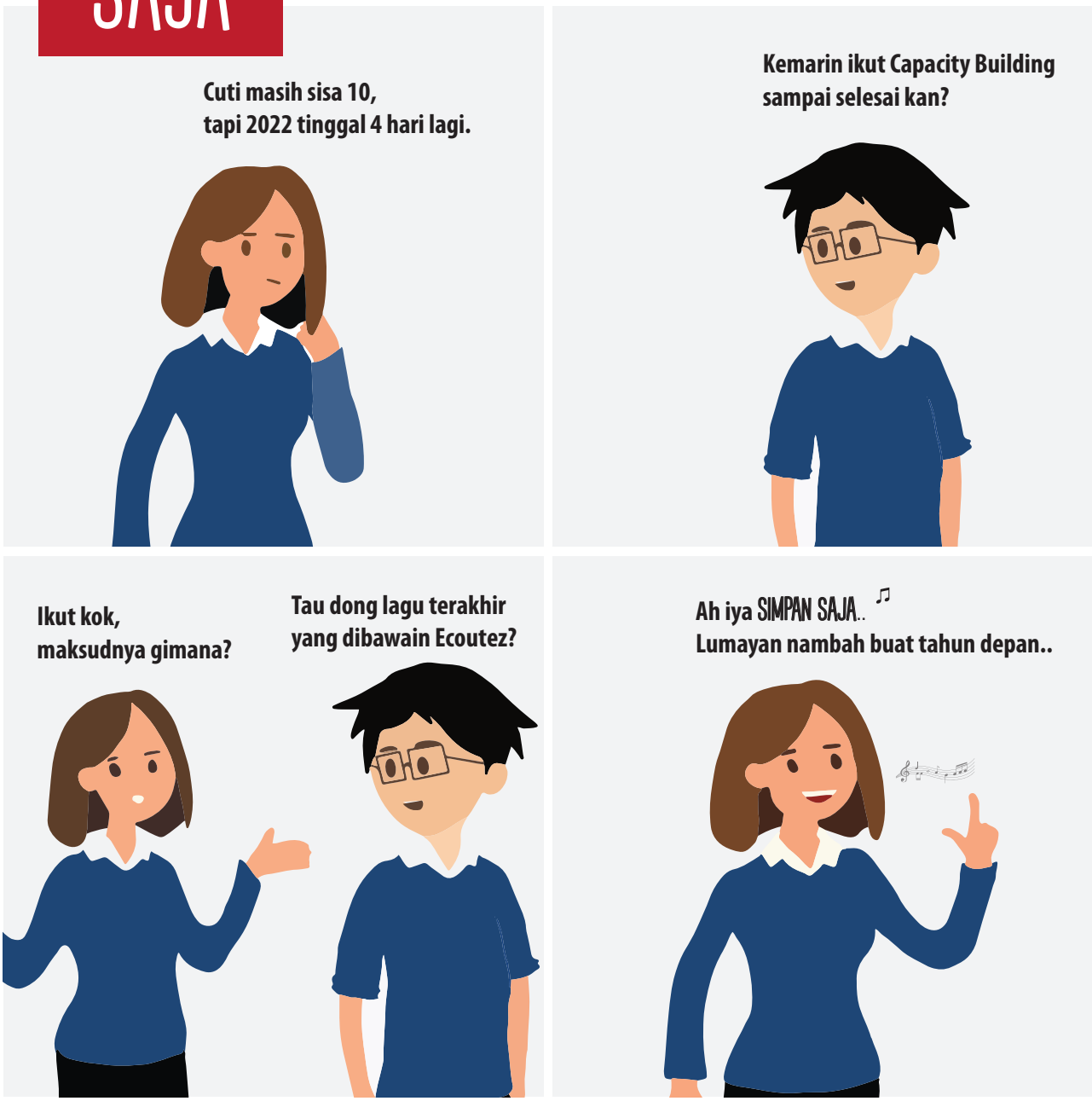

@ridwan firmansyah

Realize Your Dream on 2023

JANUARI

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1 Januari: Tahun Baru Masehi 2023
22 Januari: Tahun Baru Imlek 2574

FEBRUARI

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

18 Februari: Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 H

MARET

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

22 Maret: Hari Raya Nyepi 1945 Saka

APRIL

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

7 April: Wafat Isa Almasih
22-23 April: Hari Raya Idul Fitri 1444H

MEI

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

1 Mei: Hari Buruh Sedunia 2023
6 Mei: Hari Raya Waisak 2567
18 Mei: Kenaikan Isa Almasih

JUNI

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

1 Juni: Hari Lahir Pancasila
29 Juni: Hari Raya Idul Adha 1444H

JULI

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

19 Juli: Tahun Baru Islam 1445H

AGUSTUS

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

17 Agustus: Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-78

SEPTEMBER

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

27 September: Maulid Nabi Muhammad SAW 1445H

OKTOBER

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NOVEMBER

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

DESEMBER

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

25 Desember: Hari Raya Natal